

PEMBINAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KECAMATAN PADANG TIJI OLEH BHAYANGKARA POLSEK PADANG TIJI TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA

Akil Adidi¹, Suhaibah², Marzuki³

^{1, 2, 3} Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur
akiladidi@gmail.com¹, sihaibah@unigha.ac.id², marzuki@unigha.ac.id³

Abstrak

Petugas Bhayangkara merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang bertugas di tingkat desa atau kelurahan. Peran Bhayangkara dalam pembinaan masyarakat Gampong Kecamatan Padang Tiji sangat vital dalam menanggulangi tindak pidana di tingkat Gampong. Bhayangkara memiliki peran kunci dalam mengidentifikasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan Kamtibmas dan mampu bekerja sama dengan polisi terhadap penanggulangan tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat Kecamatan Padang Tiji oleh Bhayangkara Polsek Padang Tiji terhadap penanggulangan tindak pidana. Mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat oleh Bhayangkara Polsek Padang Tiji terhadap penanggulangan tindak pidana. Mengetahui upaya yang dilakukan dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat oleh Bhayangkara Polsek Padang Tiji dalam menanggulangi tindak pidana di Kecamatan Padang Tiji. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis sosiologi. Yuridis normatif artinya meneliti sistematika hukum, asal hukum, dan bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat Kecamatan Padang Tiji oleh Bhayangkara Polsek Padang Tiji terhadap penanggulangan tindak pidana antara lain, Pembinaan Kesadaran Hukum, Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengamanan Lingkungan, Patroli Rutin dan Pengawasan Wilayah dan Penindakan Tindak Pidana. Hambatan yang dihadapi dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat Oleh Bhayangkara Polsek Padang Tiji terhadap penanggulangan tindak pidana adalah, Keterbatasan Personel, Keterbatasan Sarana dan Prasarana, Kurangnya Partisipasi Masyarakat, Kurangnya Pendidikan Hukum, dan Tekanan Sosial dan Ekonomi. Upaya yang dilakukan dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat oleh Bhayangkara Polsek Padang Tiji dalam menanggulangi tindak pidana di Kecamatan Padang Tiji antara lain, Penggalangan Kerjasama dengan Linmas dan Perangkat Desa, Koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Sosialisasi dan Penyuluhan di Desa-desa, Edukasi Melalui Penyuluhan Hukum dan Pendampingan dan Bimbingan bagi Warga yang Rentan secara Ekonomi.

Kata Kunci: Pembinaan, Keamanan, Ketertiban

Abstract

Bhayangkara officers are members of the Indonesian National Police (Polri) who serve at the village or sub-district level. The role of Bhayangkara in community development in Gampong, Padang Tiji District, is vital in addressing criminal acts at the Gampong level. Bhayangkara has a key role in identifying various issues related to Kamtibmas and is able to cooperate with the police in addressing criminal acts. This research aims to understand the community security and order development in Padang Tiji District by the Bhayangkara Polsek Padang Tiji in addressing criminal acts. Identifying the obstacles faced in community security and order maintenance by the Bhayangkara Polsek Padang Tiji in addressing criminal acts. To understand the efforts made in community security and order maintenance by the Bhayangkara Polsek Padang Tiji in tackling criminal acts in the Padang Tiji District. This research is a normative legal and sociological legal study. Normative legal means examining the systematics of law, the origin of the law, and library materials that are secondary data and are also referred to as library research. Based on the research results, it shows that the maintenance of security and public order in the Padang Tiji District by the Bhayangkara Polsek Padang Tiji in addressing criminal acts includes Legal Awareness Development,

Community Empowerment in Environmental Security, Routine Patrols and Area Supervision, and Criminal Act Enforcement. The obstacles faced in maintaining public security and order by the Bhayangkara Polsek Padang Tiji in addressing criminal acts are: Limited Personnel, Limited Facilities and Infrastructure, Lack of Community Participation, Lack of Legal Education, and Social and Economic Pressures. The efforts made in maintaining public security and order by the Bhayangkara Polsek Padang Tiji in tackling criminal acts in the Padang Tiji District include, building cooperation with Linmas and village officials, coordinating with the local government, conducting socialization and counseling in villages, providing education through legal counseling, and offering support and guidance to economically vulnerable residents.

Keyword: *Guidance, Community Security and Order, Bhayangkara, and Criminal Offenses..*

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum melalui konstitusi dan peraturan perundang-undangan menuntut penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pancasila, khususnya dalam Sila kelima yang berbunyi: "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia".

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Selain itu, dalam Pasal 28D ayat (1) menyebutkan bahwa: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".¹

Perwujudan penegakan hukum yang ideal hanya dapat tercapai jika dilandasi oleh etika dan sesuai dengan norma hukum. Hubungan antara etika dan norma hukum ibarat dua sisi mata uang yang saling berkaitan erat.² Penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik dan efektif merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu negara dalam meningkatkan harkat dan martabat bangsa di bidang hukum, terutama dalam memberikan perlindungan hukum kepada warganya.³ Profesi hukum memiliki keterkaitan dengan berbagai bidang hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi.⁴

Berdasarkan fungsi kepolisian yang meliputi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, perhatian masyarakat terhadap polisi sangat besar. Masyarakat memiliki harapan tinggi terhadap kinerja polisi dalam menciptakan ketertiban dan keamanan. Hal ini wajar

¹Jefry Tarantang. 2021. *Etika Profesi Advokat*. Yogyakarta: K-Media, hal. 2.

²Farid Wajdi. 2020. *Etika Profesi Hukum*. Medan: CV. Pustaka Prima, hal. 49.

³Serlika Aprita. 2019. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Refika Aditama, hal. 26.

⁴Kurniawan Tri Wibowo, dkk. 2021. *Etika Profesi Dan Bantuan Hukum Di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Aksara, hal. 25.

mengingat polisi selalu berada di tengah-tengah masyarakat.

Kedekatan antara masyarakat dan polisi disebabkan oleh tugas-tugas yang diemban oleh polisi itu sendiri, yang selain sebagai penegak hukum, juga bertugas memelihara ketertiban. Selain itu, setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, dituntut untuk hidup selaras dengan etika profesi kepolisian, yang tercermin dalam sikap dan perilaku mereka baik di kantor maupun dalam kehidupan sehari-hari.⁵

Institusi kepolisian terus berbenah demi kebaikan bersama. Pandangan masyarakat mengenai citra polisi dalam penegakan hukum, baik atau buruk, menjadi faktor penentu keberhasilan upaya penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu, polisi harus membangun kerjasama yang kooperatif dengan pendekatan persuasif kepada masyarakat, sehingga polisi bukan lagi menjadi momok yang menakutkan, tetapi justru sosok yang dirindukan oleh masyarakat.

Masyarakat sudah familiar dengan istilah Bhabinkamtibmas, yang merupakan singkatan dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Bhabinkamtibmas terkenal sering membantu masyarakat dalam menangani masalah Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungannya. Peran Bhabinkamtibmas sangat penting dalam memberikan layanan atau bantuan kepolisian, terutama di desa atau kelurahan yang tidak memiliki kantor polisi atau berjarak jauh dari kantor polisi. Tugas utama Bhabinkamtibmas meliputi pembinaan masyarakat, deteksi dini, serta mediasi atau negosiasi untuk menciptakan kondisi yang kondusif di desa atau kelurahan tersebut.

Petugas Bhayangkara menjalankan fungsi *preventif* dengan bermitra bersama masyarakat. Fungsinya mencakup melakukan kunjungan atau sambang ke masyarakat untuk mendengarkan keluhan terkait permasalahan Kamtibmas serta memberikan penjelasan dan solusinya, menjaga hubungan silaturahmi, memberikan bimbingan dan penyuluhan di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM), menyebarkan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri terkait Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas), mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat, memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan, menggerakkan kegiatan masyarakat yang positif, mengkoordinasikan upaya

⁵Rahmat Ramadhani. 2020. *Hukum & Etika Profesi Hukum*. Deli Serdang: PT. Bunda Media Grup, hal. 59.

pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak terkait lainnya, serta melakukan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, dan motivasi kepada masyarakat.

Kecamatan Padang Tiji adalah salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, Indonesia. Kecamatan Padang Tiji terletak di bagian utara Pulau Sumatra, Provinsi Aceh, Indonesia. Seperti banyak daerah di Aceh, Kecamatan Padang Tiji juga memiliki warisan budaya dan tradisi yang kaya. Ini mungkin mencakup tarian tradisional, musik, serta acara-acara adat dan keagamaan yang unik untuk daerah ini. Kecamatan Padang Tiji, seperti banyak daerah di Indonesia, mungkin mengalami pertumbuhan dan pengembangan yang terus berlanjut seiring waktu, termasuk pembangunan infrastruktur baru dan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup penduduknya.

Berkenaan dengan permasalahan pembinaan keamanan dan ketertiban di kalangan masyarakat Gampong di Kecamatan Padang Tiji, khususnya terkait tingkat kriminalitas dan potensi konflik sosial, diperlukan langkah-langkah *preventif* yang efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Petugas Bhayangkara, yang merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang bertugas di tingkat desa atau kelurahan, memiliki peran dan fungsi strategis dalam mewujudkan kemitraan antara polisi dan masyarakat. Peran Bhayangkara sangat krusial dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat Gampong di Kecamatan Padang Tiji.

Berdasarkan tugas pokoknya sebagai pengembang Polmas di desa/kelurahan, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat ditempatkan di desa atau kelurahan untuk menurunkan angka kriminalitas di daerah tersebut dengan menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam penegakan hukum di masyarakat.

Peran Bhayangkara dalam pembinaan masyarakat di Gampong Kecamatan Padang Tiji sangat vital dalam menanggulangi tindak pidana di tingkat desa atau gampong. Mereka menjadi ujung tombak kepolisian di wilayah hukum Polres Pidie dan memiliki peran kunci dalam mengidentifikasi berbagai permasalahan sosial, terutama yang berkaitan dengan Kamtibmas, dan akhirnya bersedia dan mampu bekerja sama dengan polisi untuk mencegah dan mengatasi kejahatan.

Program Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat merupakan inisiatif Kepolisian untuk mendekatkan diri dan membangun kemitraan dengan masyarakat. Dengan demikian, mereka dapat bersama-sama mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan masalah di masyarakat, mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut, dan menjaga Kamtibmas.

Hal ini mendorong penulis untuk mendalami topik tersebut lebih lanjut dengan judul "Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Padang Tiji Oleh Bhayangkara Polsek Padang Tiji Dalam Penanggulangan Tindak Pidana".

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif artinya meneliti sistematika hukum, asal hukum, dan bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian kepustakaan.⁶ Serta peraturan yang mengatur tentang tindak pidana melalui penanganan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kegiatan *preventif* dan *represif* yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang ditangani.⁷

Pembahasan

Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Padang Tiji oleh Bhayangkara Polsek Padang Tiji Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana

Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, Aceh, dikenal dengan hasil perkebunannya yang melimpah, terutama pinang, dan terdiri dari 64 gampong. Dalam menjaga keamanan dan ketertiban, Bhayangkara Polsek Padang Tiji mengutamakan pendekatan *preventif* dan *represif* untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana.

Pembinaan kesadaran hukum mencakup sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Upaya ini dilakukan secara formal melalui penyuluhan di gampong dan secara informal melalui interaksi langsung dengan masyarakat. Berdasarkan wawancara, masyarakat merasakan manfaat pembinaan ini, lebih memahami hukum, dan berani melaporkan kejadian mencurigakan, sehingga lingkungan lebih aman dan tertib.

Pembinaan kesadaran hukum merupakan suatu strategi yang efektif dalam menanggulangi tindak pidana di Kecamatan Padang Tiji. Dengan adanya kerja sama Bhayangkara Polsek Padang Tiji dan aparat desa dengan masyarakat, maka pengetahuan masyarakat dapat tersalurkan sehingga mereka mampu mengetahui hak dan kewajiban serta konsekuensi hukum yang akan diterimanya.

Pemberdayaan masyarakat dalam pengamanan lingkungan merupakan pendekatan strategis yang digunakan oleh Bhayangkara Polsek Padang Tiji untuk menjaga keamanan di wilayah Kecamatan Padang Tiji. Melalui pemberdayaan ini, masyarakat tidak hanya

⁶Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.264

⁷Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, hlm.94

menjadi objek keamanan, tetapi juga menjadi subjek aktif yang berperan dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu pilar utama dalam menciptakan ketertiban dan keamanan di Kecamatan Padang Tiji.

Siskamling menjadi salah satu contoh nyata pemberdayaan masyarakat dalam pengamanan lingkungan. Bhayangkara Polsek Padang Tiji memainkan peran kunci dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam pengamanan lingkungan yang dilakukan oleh Bhayangkara Polsek Padang Tiji merupakan bentuk pembinaan yang efektif guna menanggulangi tindak pidana di wilayah kerja Polsek Padang Tiji.

Patroli rutin dan pengawasan wilayah merupakan strategi utama yang digunakan oleh Bhayangkara Polsek Padang Tiji untuk menjaga ketertiban dan mencegah terjadinya tindak pidana dalam wilayah hukum polsek Padang Tiji. Patroli dilakukan secara teratur, sering melibatkan masyarakat, dan berhasil menciptakan rasa aman di lingkungan.

Patroli rutin dan pengawasan wilayah yang dilakukan oleh Bhayangkara Polsek Padang Tiji merupakan langkah strategis yang efektif dalam menciptakan ketertiban dan keamanan di Kecamatan Padang Tiji. Melalui kehadiran polisi yang konsisten di lapangan, potensi tindak pidana dapat diminimalisir, dan masyarakat merasa lebih aman.

Penindakan terhadap tindak pidana merupakan elemen kunci dalam menjaga ketertiban dan keamanan di Kecamatan Padang Tiji. Bhayangkara Polsek Padang Tiji melakukan berbagai upaya dalam penindakan tindak pidana sebagai bentuk nyata dari pembinaan ketertiban masyarakat. Pentingnya penindakan yang tegas dan adil dalam menjaga ketertiban di wilayah hukum Kecamatan Padang Tiji.

Penindakan tindak pidana dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku serta hak-hak setiap individu. Bhayangkara Polsek Padang Tiji memprioritaskan penindakan terhadap tindak pidana yang dianggap memiliki dampak besar terhadap masyarakat, seperti kejahatan kekerasan atau pencurian. Kasus-kasus ini mendapatkan perhatian khusus dan penanganan yang cepat agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Oleh Bhayangkara Polsek Padang Tiji Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana

Bhayangkara Polsek Padang Tiji menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugas penegakan hukum dan pencegahan tindak pidana karena jumlah personel yang tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah penduduk.

Polsek Padang Tiji memiliki jumlah personel yang sangat terbatas dibandingkan

dengan kebutuhan ideal untuk melakukan patroli rutin, menangani laporan tindak pidana, dan merespon keadaan darurat. Dengan cakupan wilayah yang luas dan jumlah desa yang banyak, keterbatasan ini membuat pengawasan terhadap seluruh wilayah menjadi kurang maksimal.

Meskipun ada keluhan, beberapa warga memahami bahwa keterbatasan jumlah personel kepolisian merupakan faktor yang di luar kendali Bhayangkara Polsek Padang Tiji.

Keterbatasan sarana dan prasarana merupakan salah satu hambatan krusial yang dihadapi Bhayangkara Polsek Padang Tiji dalam upaya pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta penanggulangan tindak pidana.

Partisipasi masyarakat dan kurangnya pendidikan hukum di kalangan masyarakat Kecamatan Padang Tiji merupakan salah satu hambatan signifikan dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) oleh Bhayangkara Polsek Padang Tiji. Hal ini dapat mempengaruhi efektivitas penanggulangan tindak pidana, karena masyarakat yang kurang memahami hukum sering kali tidak mengetahui hak dan kewajibannya dalam menjaga keamanan lingkungan, serta bagaimana berperan aktif dalam proses hukum.

Tekanan sosial dan ekonomi merupakan salah satu hambatan yang signifikan dalam upaya pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Kecamatan Padang Tiji. Kondisi ini mempengaruhi perilaku masyarakat dan menjadi faktor yang mendorong munculnya tindak pidana.

Hambatan-hambatan yang dihadapi Bhayangkara Polsek Padang Tiji dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat tidak hanya berasal dari keterbatasan internal, tetapi juga dari dinamika sosial dan kondisi geografis yang kompleks.

Mengatasi hambatan ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, di mana sinergi antara polisi, perangkat desa, dan masyarakat sangat penting. Dengan terus meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat sarana dan prasarana, serta menjalin hubungan yang lebih baik dengan warga, Bhayangkara Polsek Padang Tiji dapat lebih efektif dalam menanggulangi tindak pidana dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib.

Upaya Yang Dilakukan Dalam Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Oleh Bhayangkara Polsek Padang Tiji Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Di Kecamatan Padang Tiji

Bhayangkara Polsek Padang Tiji melakukan berbagai upaya dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat untuk menanggulangi tindak pidana, meskipun menghadapi berbagai hambatan. Keterbatasan personel menjadi salah satu hambatan utama

yang dihadapi Bhayangkara Polsek Padang Tiji dalam menjalankan tugas pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Linmas atau satuan Perlindungan Masyarakat adalah unit keamanan yang terdiri dari warga setempat yang memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Selain Linmas, perangkat desa (kepala desa, perangkat gampong, dan tokoh masyarakat) juga dilibatkan dalam upaya pembinaan keamanan dan ketertiban.

Bhayangkara Polsek Padang Tiji menyampaikan bahwa "Perangkat desa adalah ujung tombak komunikasi kami di lapangan. Mereka memiliki pengaruh besar di masyarakat, sehingga pesan-pesan Kamtibmas dapat diterima lebih baik oleh warga melalui mereka".

Keterbatasan sarana dan prasarana, seperti kendaraan patroli, alat komunikasi, serta fasilitas pendukung lainnya, menjadi tantangan signifikan dalam upaya Bhayangkara Polsek Padang Tiji menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Kecamatan Padang Tiji.

Menghadapi kendala ini, salah satu solusi strategis yang diambil adalah melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie untuk mendapatkan dukungan, baik dalam bentuk peralatan maupun fasilitas penunjang lainnya. Pemerintah daerah memegang peran kunci dalam menyediakan anggaran dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan operasional kepolisian di tingkat kecamatan.

Salah satu hambatan yang sering dihadapi oleh Bhayangkara Polsek Padang Tiji adalah kurangnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung penanggulangan tindak pidana. Untuk mengatasi hal ini, Polsek Padang Tiji telah berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi dan penyuluhan di desa-desa. Sosialisasi dan penyuluhan di desa-desa memiliki peran penting dalam membangun kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat mengenai peran mereka dalam menciptakan lingkungan yang aman.

Kemudian, salah satu hambatan signifikan dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban di Kecamatan Padang Tiji adalah kurangnya pendidikan hukum di kalangan masyarakat. Banyak kasus tindak pidana yang terjadi akibat rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum dan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, Bhayangkara Polsek Padang Tiji berupaya mengatasi masalah ini dengan melaksanakan edukasi melalui penyuluhan hukum sebagai bagian dari pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Penyuluhan hukum menjadi salah satu upaya penting untuk mengatasi kurangnya pendidikan hukum di kalangan masyarakat. Sebagian masyarakat di Kecamatan Padang Tiji

masih belum memahami hukum secara mendalam, sehingga sering kali tidak menyadari tindakan yang dilakukan dapat menimbulkan masalah hukum. Dengan meningkatkan pemahaman hukum, masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam bertindak, sehingga tindak pidana yang tidak disengaja atau akibat ketidaktahuan dapat diminimalisir.

Tekanan sosial dan ekonomi merupakan salah satu faktor yang sering menjadi pemicu tindak pidana di masyarakat, terutama di wilayah yang memiliki kelompok rentan secara ekonomi. Kecamatan Padang Tiji, yang sebagian penduduknya berada dalam kondisi ekonomi menengah ke bawah, sering menghadapi masalah-masalah kriminalitas yang berakar pada tekanan ekonomi.

Faktor-faktor seperti kemiskinan, pengangguran, dan kurangnya akses terhadap sumber daya ekonomi sering kali memicu tindakan-tindakan kriminal. Masyarakat yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit sering kali tergoda untuk melakukan tindak pidana seperti pencurian, perampokan, atau bahkan terlibat dalam perdagangan narkoba sebagai jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Salah satu upaya penting dalam menangani hal ini adalah dengan melakukan pendampingan dan bimbingan bagi warga yang rentan secara ekonomi. Pendampingan dan bimbingan bagi warga yang rentan secara ekonomi merupakan salah satu bentuk pembinaan yang diharapkan dapat mengurangi tekanan yang mereka rasakan, serta memberikan mereka alternatif solusi untuk masalah ekonomi tanpa harus melibatkan diri dalam tindakan kriminal. Salah satu bentuk bimbingan yang diberikan adalah melalui program pelatihan keterampilan yang bekerja sama dengan pemerintah daerah atau LSM setempat.

Pendampingan dan bimbingan bagi warga rentan secara ekonomi merupakan salah satu langkah strategis yang diambil oleh Bhayangkara Polsek Padang Tiji dalam mengatasi tekanan sosial dan ekonomi sebagai penyebab tindak pidana. Melalui kerjasama dengan perangkat desa, pemerintah daerah, dan lembaga sosial, program ini bertujuan tidak hanya untuk meringankan beban ekonomi masyarakat tetapi juga memberikan alternatif solusi yang legal dan berkelanjutan bagi mereka yang berada dalam situasi sulit.

Meskipun menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan personel, sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat yang rendah, kurangnya pendidikan hukum, serta tekanan sosial dan ekonomi, Bhayangkara Polsek Padang Tiji terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Melalui optimalisasi sumber daya yang ada, pelibatan masyarakat, penyuluhan hukum, dan pendekatan sosial-ekonomi, Polsek Padang Tiji berusaha menanggulangi tindak pidana dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib di Kecamatan Padang Tiji.

Kesimpulan

Tugas pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dilaksanakan oleh bhayangkara dalam rangka penanggulangan tindak pidana di kecamatan padang tiji yaitu pembinaan kesadaran hukum, pemberdayaan masyarakat dalam pengamanan lingkungan, patroli rutin dan pengawasan wilayah, dan penindakan tindak pidana. hambatan yang mempengaruhi efektivitas penanggulangan tindak pidana oleh bhayangkara adalah keterbatasan personel, keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya partisipasi masyarakat, kurangnya pendidikan hukum, dan tekanan sosial dan ekonomi. dan upaya yang dapat dilakukan oleh bhayangkara polsek padang tiji dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam bentuk penggalangan kerjasama dengan linmas dan perangkat desa, koordinasi dengan pemerintah daerah, sosialisasi dan penyuluhan di desa-desa, edukasi melalui penyuluhan hukum, dan pendampingan dan bimbingan bagi warga yang rentan secara ekonomi.

Referensi

Buku

- Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar. 2015. *Dualisme Penelitian hukum Normatif Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agus Rusianto. 2018. *Tindak Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bambang Sunggono. 2002. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Burhan Ashshofa. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bernard, Raho SVD . 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Chazawi, Adami. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Farid Wajdi. 2020. *Etika Profesi Hukum*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Jefry Tarantang. 2021. *Etika Profesi Advokat*. Yogyakarta: K-Media.
- Kurniawan Tri Wibowo, dkk. 2021. *Etika Profesi Dan Bantuan Hukum Di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Aksara.
- LaRouche. 1994. *Apakah Demokrasi itu ? Rencana Besar Menghancurkan Kekuatan Militer Di Amerika Latin*, terj. Sesko TNI. Washinton DC: EIR News Service, Inc.
- Mahmud Mulyadi. 2009. *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Medan: USU press.
- M. Hasan Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.

- Rahardi, Pudi. 2007. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*. Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahmat Ramadhani. 2020. *Hukum & Etika Profesi Hukum*. Deli Serdang: PT. Bunda Media Grup.
- Rusli Muhammad. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Sadjijono. 2005. *Fungsi Kepolisian Dlam Pelaksanaan Good Governance*. Yogyakarta: Laksbang.
- Sadjijono. 2009. *Memahami Hukum Kepolisian*. Surabaya: Laksbang.
- Serlika Aprita. 2019. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Refika Aditama.
- Soerjono Soekanto. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soerjono Soekanto. 2005. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan ke-3*. Jakarta: UI Press.
- Sudaryono & Natangsa Surbakti. 2017. *Hukum Pidana: Dasar-dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Simanjuntak, B., dan I. L Pasaribu. 1990. *Membina dan Mengembangkan Generasi Muda*. Bandung: Tarsito.
- Tim Penyusun. 2015. *Buku Pedoman Kerja Bhabinkamtibmas Polda DIY*. Yogyakarta: Polda DIY.
- Jurnal**
- Gilang Raka Pratama. 2011. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi motivasi kerja polisi*. Skripsi, Jakarta: UIN Syarif hidayatullah Jakarta.
- Elsa Monica. 2014. "*Hubungan Sikap Warga Terhadap Peran Polisi Dengan Partisipasi Warga Dalam Memelihara Kamtibmas Di Kelurahan Rintis Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru*". Skripsi. Riau : UIN Sultan Sari.
- Eva Susanti. 2019. *Kinerja Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBNAS) DiKelurahan Tanjung Agung Kecamatan Batu Raja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu*. Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik Vol. 5 No. 1 April.
- Evi Rinawati, Maryani.2018. "*Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) Di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat*". JOM FISIP vol 5, Edisi II, Juli-Desember.
- Koesparmono Irsan. 1997. *Peningkatan Peran Kepolisian Dalam Pemeliharaan dan Pembinaan Keamanan Dalam Negeri*. Jurnal Ketahanan Nasional Vol. 2, No 2, Agustus.

- Mhd. Teguh Syuhada Lubis. 2017. *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia*. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni.
- Nurjaya, Inyoman. 1982. “*antara polisi, masyarakat dan pembinaan kamtibmas*”. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol 248.
- Rahmat Ramadhani. 2016. *Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah*. EduTech: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2 September.
- Tatriwarsi. 2017. “*Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Peran Serta masyarakat Kelurahan Tahunan Dalam Tugas Kamtibmas Polri Di Wilayah Polsek Umbulharjo Yogyakarta*”, Jurnal Eca Cida Vol. 2, Edisi 1, Maret.
- Wawan. 2016. *Peranan Pemerintah Desa Dalam Menaggulangi Masalah Keamanan dan Ketertiban*. Jurnal Eksekutif Vol 1 No. 7.

Peraturan Undang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2015 Tentang Polmas.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor beserta Perubahannya.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Polmas dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.